

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan. Selain itu juga mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas, bahwa setiap unit kerja sebagai pelaksana kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tatalaksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas setiap triwulan. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Triwulan III Tahun 2015 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran sampai dengan September 2015.

B. TUJUAN

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

C. DASAR PEMANTAUAN

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas

5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-055.01.1.017312/2015 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2015 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

D. METODOLOGI PEMANTAUAN

Laporan hasil pemantauan disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selain itu juga diperoleh data dari seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menggambarkan rencana penarikan anggaran dan menjelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

BAB II

GAMBARAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

A. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program Generik

1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3) Program Generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC), 1 Satker Majelis Wali Amanat dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF), dan 33 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satker Utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputian. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.49/M.PPN/HK/03/2015 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas.

Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

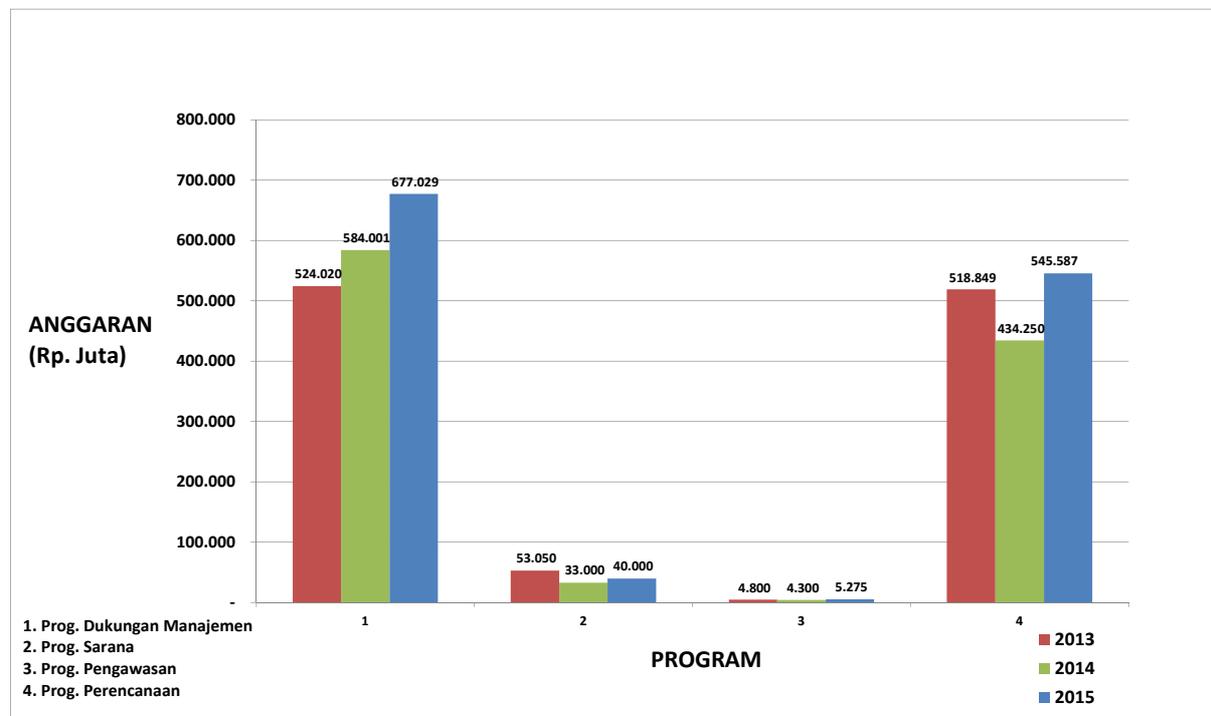
- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 12 (dua belas) PPK Kedeputian di lingkungan UKE I (Kedeputian), dan oleh 33 Satker di 33 provinsi.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014. Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2015 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.281.869.794.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 660.164.354.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 384.058.229.000,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 237.647.211.000,-. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2013-2015.

GAMBAR 1
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2013-2015



Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

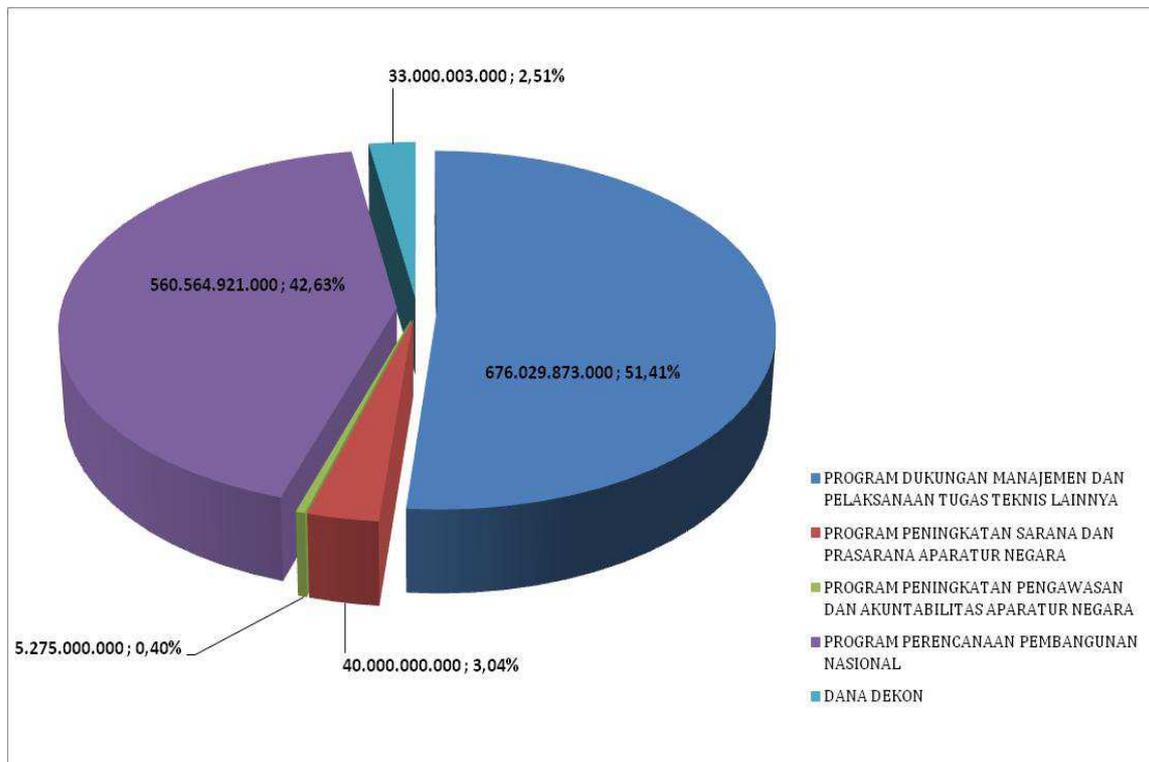
Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya penetapan kinerja tahun 2015, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2015 menurut program terdapat pada Tabel 2, dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

TABEL 1
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (dalam ribu)				
	RM	PHLN			TOTAL
		PLN	HLN	JUMLAH	
SATKER 017312	633.918.392	384.058.229	27.647.211	411.705.440	1.045.623.832
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	370.112.914	305.916.959	-	305.916.959	676.029.873
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000.000	-	-	-	40.465.872
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	5.275.000	-	-	-	5.275.000
Perencanaan Pembangunan Nasional	218.530.478	78.141.270	27.647.211	105.788.481	324.318.959
SATKER 966009	13.245.962	-	-	-	13.245.962
PPK ICCTF	13.245.962	-	-	-	13.245.962
SATKER 966009	13.000.000	-	210.000.000	210.000.000	223.000.000
PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC	13.000.000	-	210.000.000	210.000.000	223.000.000
JUMLAH	660.164.354	384.058.229	237.647.211	621.705.440	1.281.869.794

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

GAMBAR 2
PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2015



Berdasarkan Gambar 2 tersebut terlihat bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua UKE I dan dan UKE II. Pada tahun 2015, khusus untuk dana PHLN di Kementerian PPN/Bappenas terdapat 4 (empat) PLN dan 7 (tujuh) HLN, dengan nilai total sebesar Rp. 621.705.440.000,- (termasuk dana rupiah pendamping untuk PHRDP III dan PHRDP IV), sebagaimana terdapat pada Tabel 3 berikut.

TABEL 2
ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROGRAM	PHLN (dalam ribu)		
		PLN	HLN	JUMLAH
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA		305.916.959	-	305.916.959
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV	305.916.959	-	305.916.959
a	Pusbindiklatren	305.916.959	-	305.916.959
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		78.141.270	237.647.211	315.788.481
2	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	-	9.653.767	9.653.767
a	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	8.359.714	8.359.714
b	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-	1.294.053	1.294.053
3	PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	1.339.105	1.339.105
a	Direktorat Lingkungan Hidup	-	1.339.105	1.339.105
4	PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	11.285.000	15.990.091	27.275.091
A	Direktorat Transportasi	11.285.000	14.100.000	25.385.000
B	Direktorat Permukiman dan Perumahan	-	1.890.091	1.890.091
5	PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	4.070.000	664.248	4.734.248
a	Direktorat Pengembangan Wilayah	4.070.000	-	4.070.000.000
b	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	-	664.248	664.248
6	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	9.900.000	-	9.900.000
7	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	52.886.270	-	52.886.270
8	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	-	210.000.000	210.000.000
JUMLAH		384.058.229	237.647.211	621.705.440

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 560.564.921.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 244.776.440.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 315.788.481.000,- (Tabel 4).

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/ fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 4 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedepuitian.
- 2) Satker 966010 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK ICCTF.
- 3) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC.
- 4) Satker Dana Dekonsentrasi (33 Satker) di 33 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).

Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2015 yang termasuk dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebesar Rp. 33.000.003.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 33 provinsi (Tabel 5). Penyelenggaraan Dekonsentrasi bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

TABEL 3
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (dalam ribu)				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	244.776.440	78.141.270	237.647.211	315.788.481	560.564.921
1	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	21.677.760	-	9.653.767	9.653.767	31.331.527
2	PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	16.740.000	-	-	-	16.740.000
3	PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM	22.900.000	-	-	-	22.900.000
4	PPK Deputy Bidang Ekonomi	15.540.000	-	-	-	15.540.000
5	PPK Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	22.286.878	-	1.339.105	1.339.105	23.625.983
6	PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana	24.066.860	11.285.000	15.990.091	27.275.091	51.341.951
7	PPK Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah	34.280.000	4.070.000	664.248	4.734.248	39.014.248
8	PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan	15.410.000	-	-	-	15.410.000
9	PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	14.690.000	-	-	-	14.690.000
10	PPK Program Sumber Daya Air Terpadu	6.724.000	9.900.000	-	9.900.000	16.624.000
11	PPK Sekretariat <i>Infrastructure Reform Sector Development Program</i>	23.214.980	52.886.270	-	52.886.270	76.101.250
12	PPK ICCTF	13.245.962	-	-	-	13.245.962
13	PPK Sekretariat Persiapan Dan Pengembangan MCC (Satker 966009)	13.000.000	-	210.000.000	210.000.000	223.000.000

Sumber : Pagu DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

TABEL 4
ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2015

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ALOKASI (Rp)
1	10025	DKI Jakarta	799.291.000
2	20060	Jawa Barat	838.291.000
3	30060	Jawa Tengah	915.691.000
4	40069	DI Yogyakarta	920.491.000
5	50060	Jawa Timur	943.291.000
6	60004	Aceh	1.045.291.000
7	70060	Sumatera Utara	1.006.891.000
8	80019	Sumatera Barat	958.891.000
9	90020	Riau	962.491.000
10	100086	Jambi	931.291.000
11	110060	Sumatera Selatan	920.491.000
12	120022	Lampung	882.091.000
13	130019	Kalimantan Barat	949.291.000
14	140018	Kalimantan Tengah	960.691.000
15	150060	Kalimantan Selatan	961.291.000
16	160019	Kalimantan Timur	1.006.291.000
17	170021	Sulawesi Utara	1.079.491.000
18	180060	Sulawesi Tengah	1.080.091.000
19	190060	Sulawesi Selatan	1.008.091.000
20	200019	Sulawesi Tenggara	1.027.891.000
21	210019	Maluku	1.190.491.000
22	220060	Bali	976.291.000
23	230020	Nusa Tenggara Barat	974.491.000
24	240026	Nusa Tenggara Timur	1.078.291.000
25	250060	Papua	1.252.891.000
26	260070	Bengkulu	940.291.000
27	280016	Maluku Utara	1.167.091.000
28	290009	Banten	823.291.000
29	300092	Bangka Belitung	913.291.000
30	310060	Gorontalo	1.063.891.000
31	320099	Kepulauan Riau	955.291.000
32	330096	Papua Barat	1.400.491.000
33	340030	Sulawesi Barat	1.066.291.000
JUMLAH			33.000.003.000

Sumber : Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2 tahun 2015

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan RPJMN 2015-2019 dan RKP, serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 676.029.873.000,-, yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 370.112.914.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 305.916.959.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2015 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.

TABEL 5
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (dalam ribu)				TOTAL
		RM	PHLN			
			PLN	HLN	JUMLAH	
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	370.112.914	305.916.959	-	305.916.959	676.029.873
1	PPK DM I	53.747.558	-	-	-	53.747.558
2	PPK DM II	34.543.362	-	-	-	34.543.362
3	PPK DM III	225.625.001	-	-	-	225.625.001
4	PPK DM IV	54.756.993	305.916.959	-	305.916.959	360.673.952
5	PPK DOM	1.440.000				1.440.000

Sumber : Pagu DIPA Bappenas Tahun 2015

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000.000,-. Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2015 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.275.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama.

C. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN 2015

Sampai dengan Triwulan III tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, diantaranya:

1. Revisi tanggal 24 Februari 2015 adalah perubahan akun belanja.
2. Revisi satker 966009 tanggal 3 Maret 2015 adalah penambahan pagu hibah pada PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC menjadi Rp. 210.000.000.000,-.
3. Revisi tanggal 20 April 2015 adalah :
 - 1) Penambahan Belanja Operasional (002) sebesar Rp. 1.322.100.000,- pada PPK Program Dukungan Manajemen III (Biro Umum) yang berasal dari ICCTF.
 - 2) Penambahan pagu Pinjaman Pusbindiklatren menjadi Rp. 186.739.102.000,- pada kegiatan SPIRIT/WB, Rp. 29.045.744.000,- pada kegiatan PHRDP-III, dan Rp. 90.132.113.000,- pada kegiatan PHRDP-IV.
 - 3) Penambahan pagu Hibah Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance For Rice Fortification Or The Poor* (Hibah JFPR) pada Direktorat Kesehatan dan gizi masyarakat menjadi Rp. 3.059.130.000,- pada.
 - 4) Penambahan pagu Pinjaman Direktorat PKPS (IRSDP) menjadi Rp. 52.886.270.000,-.
 - 5) Pencatatan Hibah kegiatan *Slum Alleviation Policy and Action Plan* (SAPOLA) pada Direktorat Permukiman dan Perumahan ke dalam DIPA sebesar Rp. 1.890.091.000,-.

- 6) Revisi Nomor Register *Hibah Urban Mobility Denpasar* pada Direktorat Transportasi.
 - 7) Realokasi Satker ICCTF sebesar Rp. 13.977.900.000,-.
4. Revisi tanggal 25 Mei 2015 adalah :
- 1) Pencantuman pagu Hibah kegiatan *People Centered Development Programme (PCDP)* pada Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 664.248.000,-.
 - 2) Pencantuman pagu Hibah kegiatan UNFPA Country Programme Eight 2011-2015 pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.294.053.000,-.
 - 3) Pencantuman pagu Hibah kegiatan *Roadmap : Support To The Acceleration Of MDGs Achievement In Indonesia* pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 2.045.388.000,-.
 - 4) Pencantuman pagu Hibah kegiatan Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-UNICEF 2011-2015 pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 3.255.196.000,-.
5. Revisi tanggal 30 Juli 2015 adalah :
- 1) Realokasi anggaran antar satker pada Direktorat Lingkungan Hidup menjadi Rp. 731.938.000,-.
 - 2) Realokasi anggaran Satker Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) sebesar Rp. 13.245.962.000,-.
6. Revisi tanggal 11 Agustus 2015 adalah :
- 1) Realokasi anggaran antar kegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana menjadi Rp. 52.250.161.000,-.
 - 2) Realokasi anggaran antar kegiatan pada Biro SDM menjadi Rp. 1.781.070.000,-.
7. Revisi tanggal 18 September 2015 adalah realokasi antar kegiatan pada :
- 1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana menjadi Rp. 49.850.161.000,-.
 - 2) Biro SDM menjadi Rp. 6.293.062.000,-.
 - 3) Pusdatinrenbang menjadi Rp. 9.360.300.000,-.
 - 4) Direktorat Evaluasi Kinerja Daerah menjadi Rp. 10.300.000.000,-.
 - 5) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang menjadi Rp. 32.397.397.000,-.

BAB III

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.281.869.794.000,- yang terdiri dana RM sebesar Rp. 660.164.354.000,-, dana PLN sebesar Rp. 384.058.229.000,- dan HLN sebesar Rp. 237.647.211.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 713.485.912.143,- (55,66%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 301.087.466.570,- (45,61%), dana PHLN sebesar Rp. 412.398.445.573,- (66,33%). Rincian realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir September tahun 2015 dari masing-masing program sebagaimana terdapat pada Tabel 7 dan dijelaskan sebagai berikut.

TABEL 6
REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

PROGRAM	REALISASI ANGGARAN (dalam 000)					
	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	187.458.454,7	50,65	190.402.453,7	62,24	377.860.908,4	55,89
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	9.281.330,2	23,20	-	-	9.281.330,2	23,20
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	2.244.396,9	42,55	-	-	2.244.396,9	42,55
Perencanaan Pembangunan Nasional	102.103.284,8	41,71	221.995.991,8	70,30	324.099.276,7	57,82
JUMLAH	301.087.466,6	45,61	412.398.445,6	66,33	713.485.912,1	55,66

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 sebesar Rp. 560.564.921.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 244.776.440.000,-, dan dana PHLN sebesar Rp. 315.788.481.000,-. Sampai dengan akhir September 2015, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 324.099.276.657,- (57,82%). Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincian realisasi penyerapan dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 8 dan Gambar 3.

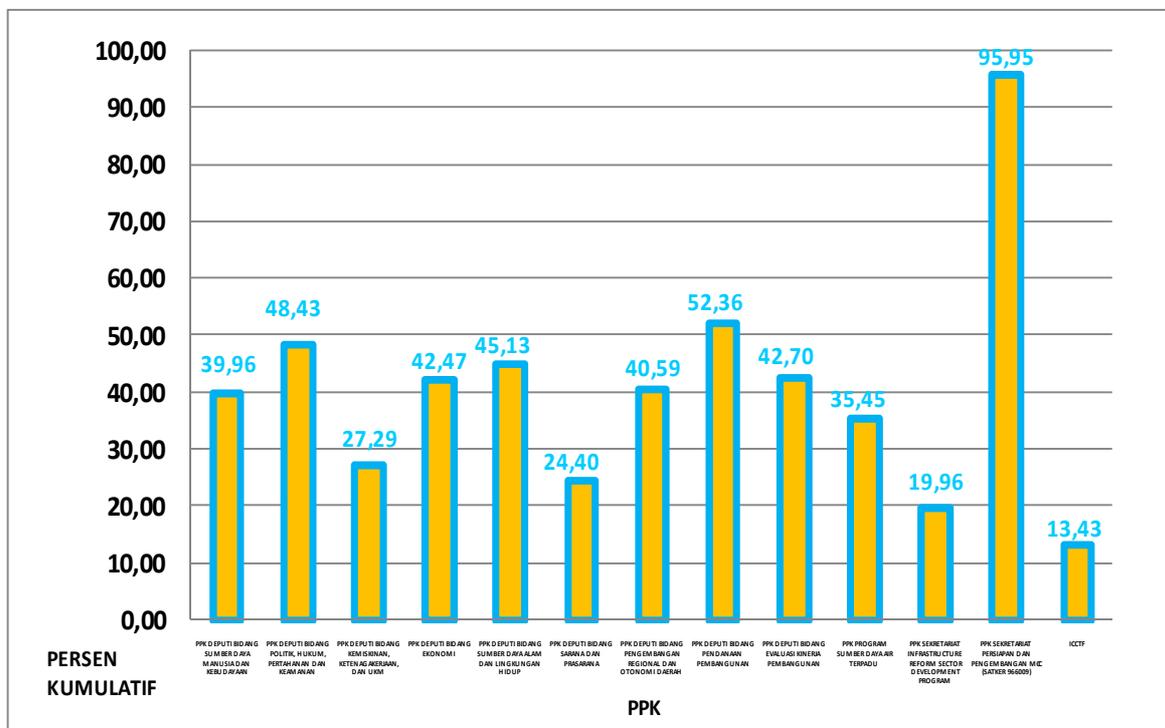
TABEL 7
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(NON DANA DEKONSENTRASI)
TRIWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		244.776.440	315.788.481	560.564.921	102.103.279	41,71	221.995.991	70,30	324.099.271	57,82
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	21.677.760	9.653.767	31.331.527	10.413.317	48,04	2.108.102	21,84	12.521.419	39,96
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	16.740.000	-	16.740.000	8.106.506	48,43	-	-	8.106.506	48,43
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	22.900.000	-	22.900.000	6.250.261	27,29	-	-	6.250.261	27,29
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	15.540.000	-	15.540.000	6.599.157	42,47	-	-	6.599.157	42,47
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	22.286.878	1.339.105	23.625.983	9.359.156	41,99	1.302.539	97,27	10.661.695	45,13
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	24.066.860	27.275.091	51.341.951	12.529.705	52,06	-	-	12.529.705	24,40
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	34.280.000	4.734.248	39.014.248	15.837.013	46,20	-	-	15.837.013	40,59
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.410.000	-	15.410.000	8.068.319	52,36	-	-	8.068.319	52,36
9	PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	15.690.000	-	15.690.000	6.698.926	42,70	-	-	6.698.926	42,70
10	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	6.724.000	9.900.000	16.624.000	2.213.138	32,91	3.680.468	37,18	5.893.606	35,45
11	PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	23.214.980	52.886.270	76.101.250	5.042.558	21,72	10.144.432	19,18	15.186.990	19,96
12	PPK ICCTF (SATKER 966010)	13.245.962	-	13.245.962	1.779.177	13,43	-	-	1.779.177	13,43
13	PPK SEKRETARIAT PERSIAPAN DAN PENGEMBANGAN MCC (SATKER 966009)	13.000.000	210.000.000	223.000.000	9.206.045	70,82	204.760.450	97,50	213.966.496	95,95

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 3
GRAFIK REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015



Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Realisasi penyerapan tertinggi sampai dengan Triwulan III tahun 2015 terdapat pada PPK Sekretariat Persiapan dan Pengembangan MCC yaitu 95,95%, kemudian PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan sebanyak 52,36%. Sedangkan penyerapan terendah terdapat pada PPK ICCTF yaitu 13,43%. Berikut penjelasan realisasi penyerapan oleh setiap PPK.

1) PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 sebesar Rp. 31.331.527.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 21.677.760.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 9.653.767.000,-. Sampai dengan akhir bulan September, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.521.419.460,- (39,96%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 9.

TABEL 8
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	21.677.760	9.653.767	31.331.527	10.413.316	48,04	2.108.102	21,84	12.521.418	39,96
a	Sekretariat PPK Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan	307.760	-	307.760	176.100	57,22	-	-	176.100	57,22
b	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	8.305.000	8.359.714	16.664.714	4.374.900	52,68	2.108.102	25,22	6.483.002	38,90
c	Direktorat Pendidikan	2.670.000	-	2.670.000	1.341.152	50,23	-	-	1.341.152	50,23
d	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.545.000	1.294.053	6.839.053	2.202.724	39,72	-	-	2.202.724	32,21
e	Direktorat Agama Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.850.000	-	4.850.000	2.318.440	47,80	-	-	2.318.440	47,80

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Dana HLN pada Kedeputusan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan Koordinasi Pengelolaan Hibah *Assistance For Rice Fortification For the Poor* (Hibah JFPR : *Assistance for Rice Fortification for the poor*) pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Hibah dari ADB ini akan berakhir pada akhir tahun 2015. Sehubungan dengan adanya penyesuaian jadwal, pengumpulan data akhir (*endline*) diselesaikan pada akhir Mei 2015, dan sampai dengan 30 September 2015 masih dilakukan pengolahan dan analisis data, sehingga penarikan dana baru dilakukan untuk tahap kedua. Penarikan untuk tahap selanjutnya akan dilakukan pada pertengahan November 2015.

Hibah langsung yang tidak masuk dalam DIPA adalah:

- a. *Country Programme Action Plan (CPAP) 2011-2015 Government of Indonesia - UNICEF Programme of Cooperation*. Tujuan dari hibah ini adalah untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Ibu dan Anak. Hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan nilai alokasi USD 1.518.014 (MYWP) atau Rp. 8.458.900.000,- (DIPA). Sampai dengan triwulan III tahun 2015, hibah ini sudah menarik dana Rp. 5.875.371.056.
- b. *Support to the Acceleration of MDG Achievement in Indonesia (2013-2015)*. Hibah dari UNDP ini bertujuan untuk percepatan tujuan MDGs dengan nilai

alokasi USD 900.000 telah dimulai pada 31 Januari 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2015. Hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Alokasi dana pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.893.380.000 dan realisasi sampai dengan Triwulan III adalah sebesar Rp. 2.951.000.000.

- c. *Country Programme Eight 2011-2015 (Programme of Cooperation between The GOI – UNFPA)*. Dengan tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan RPJM, MDGs dan ICPD, pada akhir periode pelaksanaan, hibah ini dialokasikan sebesar USD206.463 (Rp2.461.055.000) untuk kegiatan Strategi Dinamika Kependudukan (PDS). Hibah ini dilaksanakan oleh Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sampai dengan triwulan III sudah terserap sebesar Rp1,736,445,357 (70,56%).

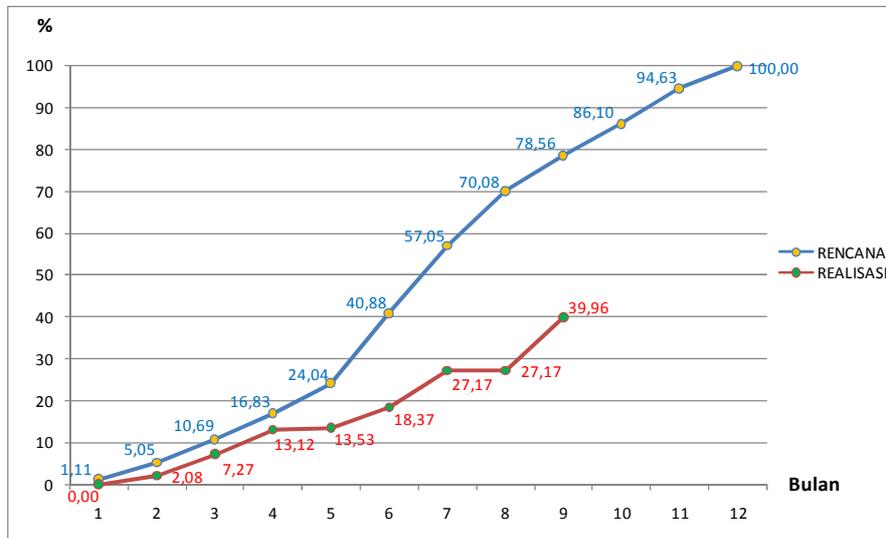
Secara umum, realisasi kegiatan terkendala oleh: (a) Penyerapan hibah langsung yang belum dapat dicatatkan karena menunggu proses aplikasi di KPPN; (b) Konfirmasi penambahan alokasi kegiatan prakarsa strategis (Revolusi Mental dan Indeks Pembangunan Masyarakat) dan *quick win* (Perlindungan Anak) di pertengahan tahun; (c) Adanya perubahan sistem aplikasi penggantian nama rekening Bendahara BPP SDM; (d) Pelaksanaan Kegiatan UKE I/II yang belum dapat optimal, antara lain karena restrukturisasi Bappenas, revisi anggaran yang belum dapat dilakukan, pergantian PPBJ dan BPP, dan perbedaan persepsi atas aturan sehingga menghambat proses pengajuan dan verifikasi.

Sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan Hibah telah dilakukan melalui proses Revisi ke-7 DIPA Bappenas, sehingga diharapkan dapat mendukung proses pencatatan penyerapan Hibah.
2. Pelaksana kegiatan UKE I/II di lingkungan Kedeputusan SDM didorong untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
3. Perlu dilakukan pemetaan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2016.
4. Sekretariat PPK, BPP, PPBJ, dan PPHP akan berkoordinasi dan berupaya memfasilitasi pelaksana kegiatan pelaksanaan UKE I/II secara optimal.

Realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

GAMBAR 4
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SAMPAI TRIWULAN III TAHUN 2015



2) PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) sebesar Rp. 16.740.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 8.106.506.417,- (48,43%). Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE II di Kedeputian Bidang Polhukhankam dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 10 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

Realisasi penyerapan anggaran PPK Deputy Polhukhankam masih jauh dibawah target yang direncanakan, dikarenakan :

1. Inpres Stranas PPK yaitu Inpres Nomor & Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi baru terbit bulan Mei 2015.
2. Akhir Mei baru turun revisi DIPA untuk kegiatan-kegiatan koordinasi strategis sehingga belum ada realisasi penyerapan.
3. Adanya pergantian pimpinan unit kerja eselon II (Direktur).
4. Adanya SE Menpan dan RB tentang Pembatasan Rapat di Hotel.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain :

1. Segera melaksanakan kegiatan koordinasi dengan mitra K/L dalam rangka penajaman aksi, monitoring, dan penyusunan aksi tahun mendatang.
2. Segera merealisasikan rencana-rencana kegiatan seperti: perjalanan ke daerah, seminar/sosialisasi/ rapat koordinasi, dan pengadaan-pengadaan (konsultan, jasa, persediaan, modal)
3. Segera mematangkan konsep untuk dilakukan finalisasi.
4. Direktur Analisa PP mengirim memo mengusulkan kemudahan melakukan rapat di hotel untuk koordinasi lintas K/L.

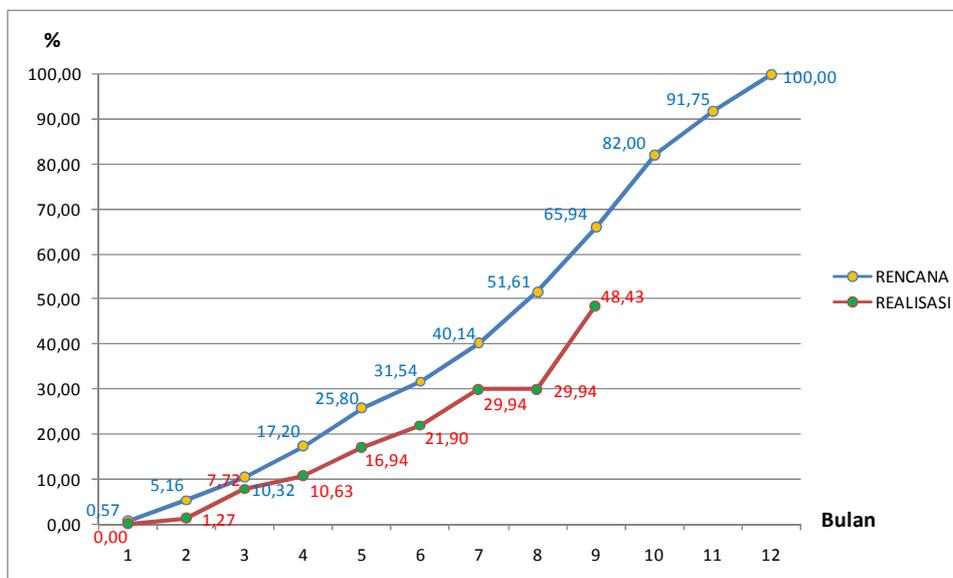
TABEL 9
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	16.740.000	-	16.740.000	8.106.504	48,43	-	-	8.106.504	48,43
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Polhankam	850.000	-	850.000	424.052	49,89	-	-	424.052	49,89
	b Direktorat Politik dan Komunikasi	4.170.000	-	4.170.000	1.851.932	44,41	-	-	1.851.932	44,41
	c Direktorat Aparatur Negara	3.450.000	-	3.450.000	1.526.202	44,24	-	-	1.526.202	44,24
	d Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.700.000	-	3.700.000	2.062.001	55,73	-	-	2.062.001	55,73
	e Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	2.620.000	-	2.620.000	1.271.324	48,52	-	-	1.271.324	48,52
	f Direktorat Pertahanan dan Keamanan	1.950.000	-	1.950.000	970.993	49,79	-	-	970.993	49,79

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 5
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN III TAHUN 2015



3) PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 22.900.000.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 6.250.261.232,- (27,29%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 11 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III ini masih sangat rendah, dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang terlambat dalam pelaksanaannya, dan adanya Surat Edaran dari Kementerian PAN & RB terkait pembatasan kegiatan rapat di luar kantor. Untuk menindaklanjutinya, anggaran kegiatan rapat diluar kantor direalokasi ke dalam kegiatan lain.

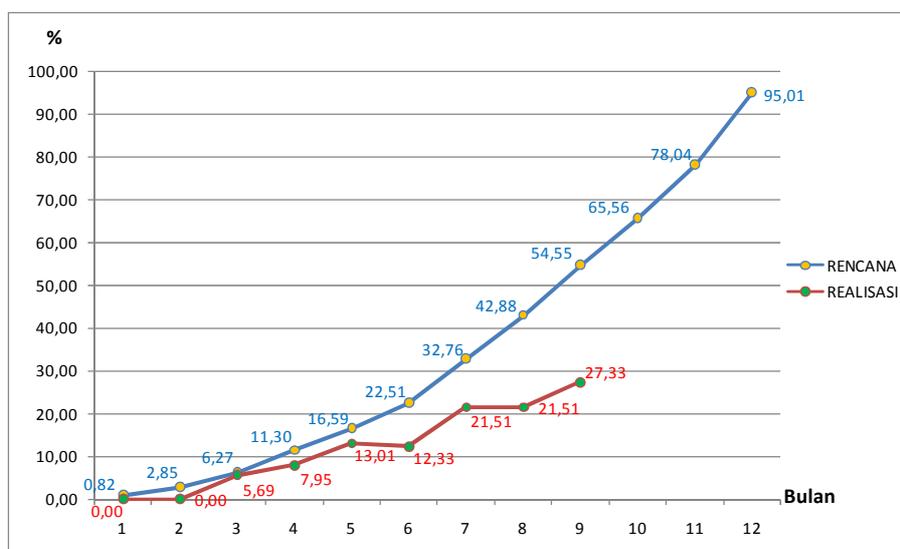
TABEL 10
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TIRWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	22.900.000	-	22.900.000	6.250.258	27,29	-	-	6.250.258	27,29
a	Sekretariat PPK Dep. Bid. Kemiskinan, Ketenagakerjaan & UKM	900.000	-	900.000	475.025	52,78	-	-	475.025	52,78
b	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	5.250.000	-	5.250.000	1.015.625	19,35	-	-	1.015.625	19,35
c	Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja	4.350.000	-	4.350.000	1.489.931	34,25	-	-	1.489.931	34,25
d	Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.750.000	-	3.750.000	1.433.749	38,23	-	-	1.433.749	38,23
e	Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.500.000	-	2.500.000	1.070.254	42,81	-	-	1.070.254	42,81
f	Global Pulse	6.150.000	-	6.150.000	765.674	12,45	-	-	765.674	12,45

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 6
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TRIWULAN III TAHUN 2015



4) PPK Deputy Bidang Ekonomi

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Ekonomi sebesar Rp. 15.540.000.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 6.599.157.240,- (42,47%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputusan sebagaimana terdapat pada Tabel 12 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

Realisasi penyerapan anggaran PPK Deputi Ekonomi masih dibawah target rencana penyerapan. Hal ini dikarenakan antara lain:

1. Adanya perubahan PMK yang mengatur pengendalian jumlah honorarium yang bisa diterima oleh anggota Tim Kegiatan pada Bulan Maret 2015, perubahan status CPNS menjadi PNS, pindahnya pejabat karena lelang jabatan serta adanya PNS yang tugas belajar dan pulang belajar sehingga mengharuskan adanya revisi SK.
2. Belum ditandatanganinya perubahan SK kegiatan di tingkat Menteri karena pergantian Menteri PPN/Kepala Bappenas di bulan Agustus 2015 dan adanya penambahan kegiatan strategis di bulan Juni (Techno Park, Kedalaman Antar Sektor Ekonomi dan FMS sehingga beberapa kegiatan baru memulai kontrak tenaga ahli di pertengahan tahun 2015
3. Adanya SE dari Men PAN & RB yang membatasi kegiatan rapat di luar kantor (dalam kota dan luar kota) sehingga banyak menyebabkan proses revisi RAB.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain :

1. Segera merevisi SK Tim Kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai SK yang sudah ditetapkan.
2. Segera melakukan proses pengajuan perubahan SK kegiatan, dan segera melaksanakan kegiatan strategis dengan penyesuaian jadwal sampai dengan akhir tahun 2015.
3. Merealokasi anggaran rapat di luar kantor ke kegiatan lainnya.
4. Segera merealisasikan rencana-rencana kegiatan seperti: perjalanan ke daerah, seminar/sosialisasi/ rapat koordinasi, dan pengadaan-pengadaan (konsultan, jasa, persediaan, modal)

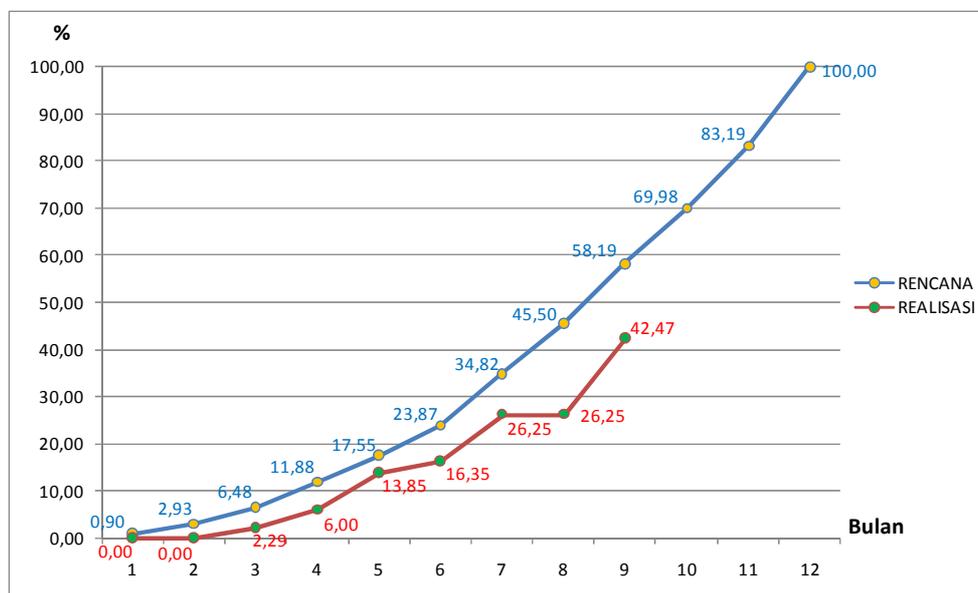
TABEL 11
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI TRIWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	15.540.000	-	15.540.000	6.599.154	42,47			6.599.154	42,47
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Ekonomi	350.000	-	350.000	194.822	55,66	-		194.822	55,66
	b Direktorat Perencanaan Makro	3.350.000	-	3.350.000	1.421.569	42,43	-		1.421.569	42,43
	c Direktorat Keuangan Negara	3.274.000	-	3.274.000	978.598	29,89	-		978.598	29,89
	d Direktorat Jasa Keuangan dan Analisa Moneter	2.258.000	-	2.258.000	951.662	42,15	-		951.662	42,15
	e Dir. Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional	2.750.000	-	2.750.000	1.838.950	66,87	-		1.838.950	66,87
	f Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN	3.558.000	-	3.558.000	1.213.553	34,11	-		1.213.553	34,11

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 7
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EKONOMI TRIWULAN III TAHUN 2015



5) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 sebesar Rp. 23.625.983.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir September 2015 sebesar Rp. 10.661.695.761,- (45,13%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II

termasuk untuk kegiatan koordinasi ke deputian sebagaimana terdapat pada Tabel 13 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II terlihat pada Gambar 8.

Berikut beberapa kendala yang menyebabkan masih rendahnya realisasi anggaran PPK SDA LH adalah:

1. Dana TUP tidak rutin setiap bulan.
2. Pengadaan Workshop/Kegiatan di luar kantor terbatas oleh aturan yang berlaku.
3. DIPA PPK ICCTF baru disahkan pada Bulan Mei, sehingga penyerapan berjalan dengan lambat.
4. Keterbatasan personil/staf dalam melakukan kegiatan yang dikarenakan kesibukan internal.
5. Lambatnya pencairan UP dan TUP.
6. Keterlambatan Kontrak Tenaga ahli.
7. Adanya pergantian pimpinan.

Langkah-langkah yang diambil untuk menindaklanjuti permasalahan dan mempercepat penyerapan anggaran adalah :

1. Segera mengajukan dana TUP setiap bulan.
2. Penyelenggaraan acara diluar kantor tetap dilaksanakan mengingat kapasitas di dalam kantor terbatas dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi antar staf untuk mempercepat dan melancarkan kegiatan.
4. Mempercepat frekuensi pencairan UP dan TUP.
5. Segera menyelesaikan Kontrak Tenaga Ahli.
6. Pengajuan kembali revisi internal untuk penyesuaian kegiatan dan anggaran.

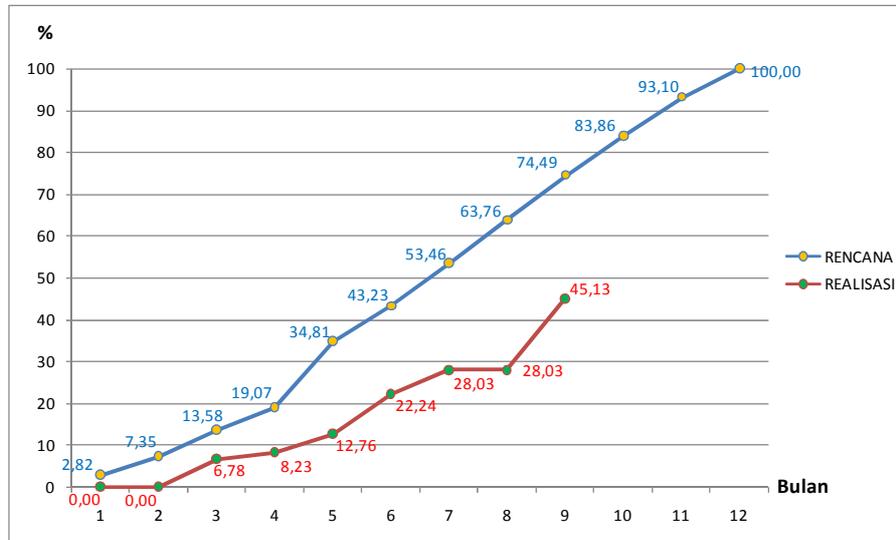
TABEL 12
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	22.286.878	1.339.105	23.625.983	9.359.153	41,99	1.302.539	97,27	10.661.692	45,13
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.302.840	-	1.302.840	946.335	72,64	-		946.335	72,64
	b Direktorat Pangan dan Pertanian	3.720.000	-	3.720.000	1.977.748	53,17	-		1.977.748	53,17
	c Direktorat Kehutanan & Konservasi Sumber Daya Air	3.140.000	-	3.140.000	923.761	29,42	-		923.761	29,42
	d Direktorat Kelautan dan Perikanan	5.000.000	-	5.000.000	1.406.066	28,12	-		1.406.066	28,12
	e Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	3.120.000	-	3.120.000	1.933.878	61,98	-		1.933.878	61,98
	f Direktorat Lingkungan Hidup	4.681.938	1.339.105	6.021.043	1.850.190	39,52	1.302.539	97,27	3.152.729	52,36
	g ICCTF	1.322.100	-	1.322.100	321.175	24,29			321.175	24,29

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 8
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN III TAHUN 2015



6) PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 51.341.951.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 24.066.860.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 27.275.091.000,-. Realisasi penyerapan anggaran RM sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 52,06 %, sedangkan realisasi penyerapan dana PHLN masih 0 %, sehingga secara total realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 24,40 %.

Kegiatan yang didanai oleh PHLN yang belum terserap tersebut adalah:

1. Kegiatan Pinjaman yang dikelola oleh Direktorat Transportasi Tahun Anggaran 2015 yaitu **Regional Road Development Project (RRDP) - Study on Indonesia Transport Sector Deelopment Strategy and Policy** (Loan 2817-INO). Pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) ini untuk meningkatkan kinerja sektor transportasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di Indonesia direncanakan akan selesai pada 31 Mei 2017. Nilai kontrak seluruhnya untuk proyek ini sebesar \$ 1.300.000, dengan alokasi di TA 2015 sebesar Rp.11.285.000.000. Namun hingga saat ini kegiatan ini masih dalam proses lelang, masih dalam proses NOL kontrak sehingga dana belum terserap hingga saat ini. Untuk itu diharapkan setelah NOL Kontrak terbit akan dilakukan penandatanganan kontrak, penerbitan *Notice to Proceed* lalu dilakukan penagihan uang muka sebesar 20% di bulan November 2015.

2. Hibah langsung yang dikelola oleh Direktorat Transportasi Tahun Anggaran 2015 adalah ***Consulting Services for the Preparation of a Pre-Feasibility in Urban Mobility Denpasar Project*** - BMZ ID 2099 15 356 (KfW) dan ***Technical Assistance for The Surabaya Urban Transport Corridor Development Project*** - TF 016825 (World Bank).
 - a. ***Consulting Services for the Preparation of a Pre-Feasibility in Urban Mobility Denpasar Project*** - BMZ ID 2099 15 356 – KfW
Hibah dari KfW ini memiliki tujuan untuk membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam menyusun strategi 5 tahunan transportasi umum yang atraktif, aman dan terjangkau secara ekonomi di Kota Denpasar. Nilai kontrak kegiatan ini sebesar EUR 229.450 atau alokasi di TA 2015 sebesar Rp. 3.600.000.000. Periode pelaksanaan kegiatan ini selama 5 (lima) bulan dan pelaksanaannya telah selesai. Saat ini ADPL WA sudah selesai dan tengah menunggu diterbitkan SP-3.
 - b. ***Technical Assistance for The Surabaya Urban Transport Corridor Development Project*** - TF 016825 – World Bank.
Penyusunan studi kelayakan untuk mendukung rencana investasi Pemerintah Kota Surabaya dalam pembangunan Kereta Api Cepat Perkotaan dengan nilai kontrak sebesar USD 1.250.000 atau alokasi pada TA 2015 sebesar Rp.10.500.000.000. Progres kegiatan ini yaitu akan dilakukan persiapan pembahasan *Data Collection, Market Assessment, dan Preliminary Design*. Lalu setelahnya akan dilakukan penarikan di kuartal IV (bulan November) ini yaitu sebesar USD 625.000 atau sebesar 50% dari nilai kontrak.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, PPK Deputi Sarana dan Prasarana telah mengambil langkah, antara lain :

1. Mempercepat proses kontrak dan administrasi oleh pihak konsultan.
2. Berkoordinasi dengan bagian verifikasi untuk mempercepat SP3.
3. Berkoordinasi dengan pihak perusahaan konsultan, untuk dapat menagihkan sesuai dengan kontrak.

Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 14 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 9.

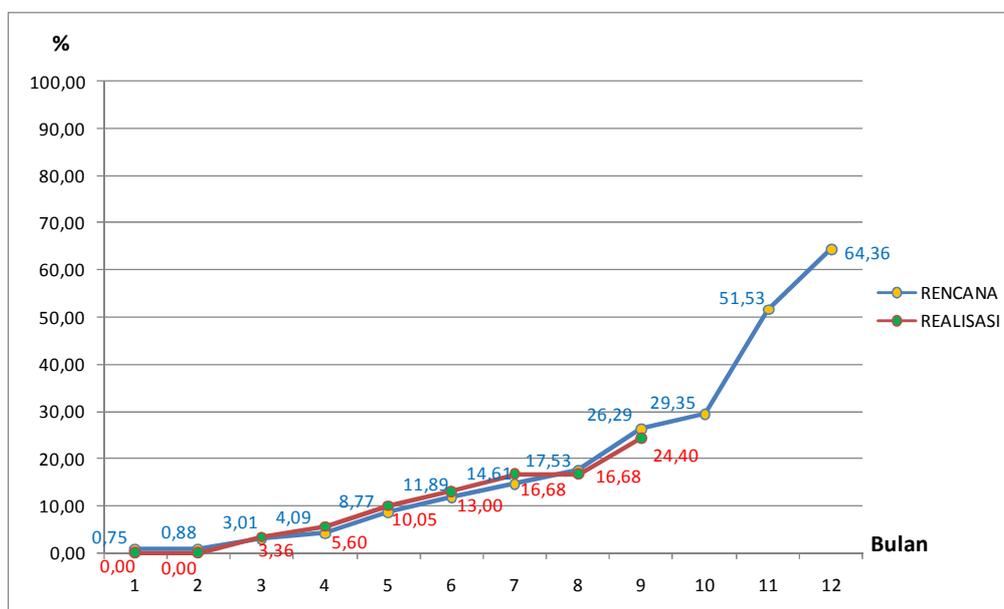
TABEL 13
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN III TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	24.066.860	27.275.091	51.341.951	12.529.704	52,06	-	-	12.529.704	24,40
	a Sekretariat PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	350.000	-	350.000	175.863	50,25	-	-	175.863	50,25
	b Direktorat Transportasi	8.026.000	25.385.000	33.411.000	4.752.294	59,21	-	-	4.752.294	14,22
	c Direktorat Permukiman dan Perumahan	4.540.860	1.890.091	6.430.951	2.135.966	47,04	-	-	2.135.966	33,21
	d Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika	5.150.000	-	5.150.000	2.726.564	52,94	-	-	2.726.564	52,94
	e Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta	6.000.000	-	6.000.000	2.739.017	45,65	-	-	2.739.017	45,65

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 9
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN III TAHUN 2015



7) PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 39.014.248.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 34.280.000.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 4.734.248.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir September 2015 mencapai Rp. 15.837.013.665,- (40,59%) sebagaimana terdapat pada Tabel 15.

TABEL 14
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN III TAHUN 2015

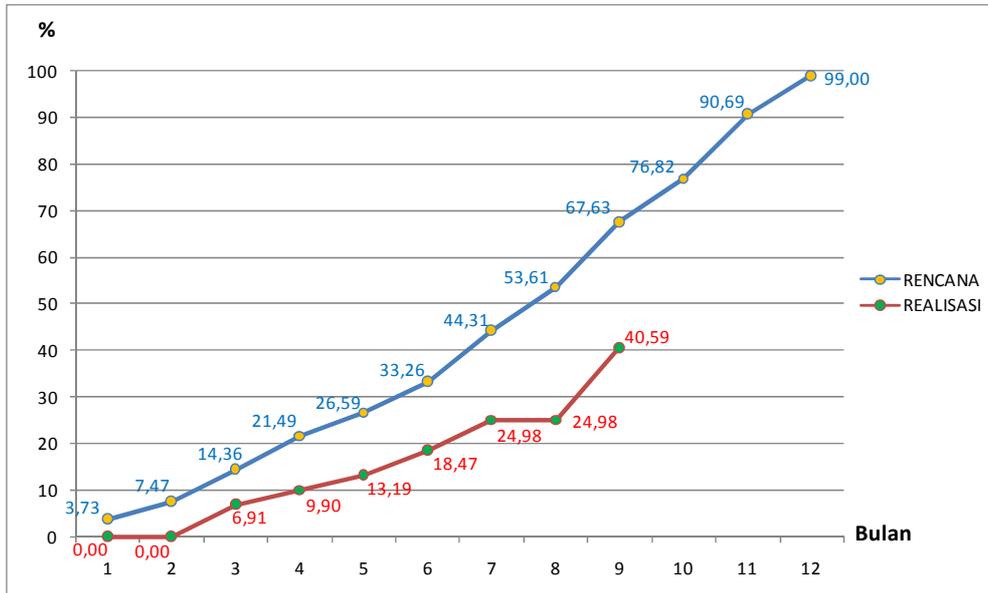
(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	34.280.000	4.734.248	39.014.248	15.837.013	46,20	-	-	15.837.013	40,59
a	Sekretariat PPK Deputi Bid. Pengembangan Regional & Otda	350.000	-	350.000	224.442	64,13	-	-	224.442	64,13
b	Direktorat Pengembangan Wilayah	6.484.719	4.070.000	10.554.719	3.639.480	56,12	-	-	3.639.480	34,48
c	Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	4.230.000	664.248	4.894.248	2.058.389	48,66	-	-	2.058.389	42,06
d	Direktorat Otonomi Daerah	7.555.281	-	7.555.281	3.205.600	42,43	-	-	3.205.600	42,43
e	Direktorat Perkotaan dan Perdesaan	11.150.000	-	11.150.000	3.712.957	33,30	-	-	3.712.957	33,30
f	Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan	4.510.000	-	4.510.000	2.996.143	66,43	-	-	2.996.143	66,43

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah terlihat pada Gambar 10.

GAMBAR 10
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN III TAHUN 2015



Pelaksanaan pinjaman *Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RISE) II* yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Wilayah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, serta penguatan institusi lokal di tingkat Desa. Hambatan yang ada adalah terdapat kesalahan dalam pencatatan nomor Loan di JICA sehingga pencairan uang muka terhambat menunggu proses ulang dan persetujuan dari pihak JICA Jepang. Untuk dan Hibah yang dikelola Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, pencantuman dalam DIPA Bappenas baru disahkan tanggal 25 Mei 2015 (Revisi-3), karena Project Document baru di tanda tangani pihak UNDP tanggal 8 April 2015, dan Realisasi PHLN yang sudah dilaksanakan sebesar 85.01% (Rp.566.474.486) akan tetapi belum dilaporkan pencatatannya (SP2HL) sehingga pencatatan dalam DIPA Bappenas untuk penyerapan sampai dengan Juni masih nihil (Closing Date 31 Juli 2015).

Untuk penyerapan anggaran Rupiah Murni, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Adanya beberapa “penugasan tambahan” yang terkadang mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin direktorat seperti pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang, temu konsultasi triwulanan, pangripta nusantara dll.

2. Adanya peraturan baru mengenai penyelenggaraan konsinyiring/pertemuan/rapat di hotel yang sebelum pelaksanaannya mengharuskan adanya beberapa "syarat administrasi tambahan" yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan cenderung berada di dalam kantor yang hanya menyerap sedikit anggaran.
3. Adanya perubahan SOTK mitra K/L menyebabkan perlunya revisi SK kegiatan koordinasi strategis khususnya pada keanggotaan mitra K/L sesuai dengan SOTK baru
4. Perubahan anggota dalam SK mengikuti penyusunan substansi didalamnya sehingga proses penyerapan tidak dapat maksimal. Untuk penyesuaian rencana kerja berdasarkan perubahan SK diperlukan rapat koordinasi yang cukup intensif.
5. Terlambatnya DIPA kegiatan Prakarsa dan Koordinasi Strategis; *Quickwins* dan Program Lanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk percepatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2015 antara lain:

1. Memprioritaskan rapat internal dalam format rapat di luar jam kantor (RDK)
2. Perjalanan dinas ke daerah disertai dengan pelaksanaan FGD di daerah dengan mengundang beberapa stakeholder di daerah dan narasumber.
3. Mengadakan pertemuan dengan mengundang narasumber dari daerah dengan menanggung seluruh pembiayaan.
4. Melakukan revisi anggaran (khususnya internal) ke beberapa mata anggaran strategis dapat dilakukan penyerapan dengan cepat.
5. Melakukan rapat/seminar/FGD/konsinyasi di hotel
6. Mengajukan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengajuan LS dan LS Reimburse
7. Mempercepat kegiatan yang direncanakan dilakukan pada akhir tahun menjadi bulan November

Hal-hal yang dapat dilakukan secara bersama (Lintas Direktorat) Untuk Percepatan Penyerapan Kegiatan antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan FGD diluar kota dapat mengundang direktorat lain yang terkait secara substansi sehingga dapat membantu penyerapan.
- Hasil sementara Kegiatan Kajian Pengembangan Wilayah melalui Kawasan Strategis menunjukkan bahwa permasalahan hukum dan penguasaan tanah di

lokasi kawasan strategis menjadi hambatan pengembangan kawasan strategis dalam pengembangan wilayah. Sehingga kegiatan ini dapat melibatkan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

- Meningkatkan kualitas data dan informasi di tingkat kabupaten/kota serta desa melalui pelaksanaan konsinyasi bersama dengan Direktorat Otonomi Daerah dan Direktorat Perkotaan dan Perdesaan

8) PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional. Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2015 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.410.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 8.068.319.964,- (52,36%) sebagaimana terdapat pada Tabel 16. Sampai dengan Triwulan III ini, penyerapan anggaran pada PPK Deputi Pendanaan Pembangunan masih relatif rendah, dikarenakan adanya aturan yang ketat (pembatasan) kegiatan rapat di luar kantor (konsinyering) yang menyebabkan penundaan/pembatalan kegiatan tersebut, serta SK Menteri pada kegiatan Koordinasi Strategis KSST belum terbit.

TABEL 15
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2015

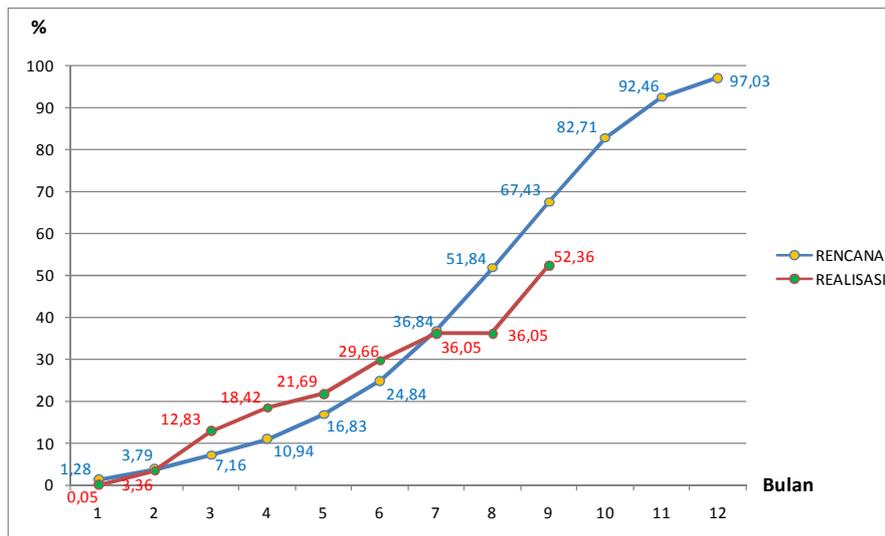
(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	15.410.000	-	15.410.000	8.068.317	52,36	-	-	8.068.317	52,36
	a Sekr. PPK Deputi Bid. Pendanaan Pembangunan	350.000	-	350.000	480.696	137,34	-	-	480.696	137,34
	b Dir. Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan	2.666.059	-	2.666.059	1.256.633	47,13	-	-	1.256.633	47,13
	c Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan	3.772.803	-	3.772.803	2.530.360	67,07	-	-	2.530.360	67,07
	d Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	2.690.309	-	2.690.309	1.171.702	43,55	-	-	1.171.702	43,55
	e Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	4.113.985	-	4.113.985	1.627.857	39,57	-	-	1.627.857	39,57
	f Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral	1.816.844	-	1.816.844	1.001.069	55,10	-	-	1.001.069	55,10

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan terlihat pada Gambar 11.

GAMBAR 11
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2015



9) PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan sebesar Rp. 14.690.000.000,-, dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp. 6.698.926.662,- (42,70%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 17 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 12.

Beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2015 adalah:

1. Terlambatnya revisi.
2. Adanya penugasan lain di lingkup Eselon II.
3. Adanya restrukturisasi Pejabat Eselon II.
4. Belum adanya Pejabat Eselon I yang definitif.
5. Adanya aturan yang membatasi rapat di luar kantor.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, telah dilakukan realokasi anggaran rapat di luar kantor ke dalam anggaran perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan di lingkup Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan (evaluasi RPJMN, evaluasi pelaksanaan RKPD, Inpres No. 1).

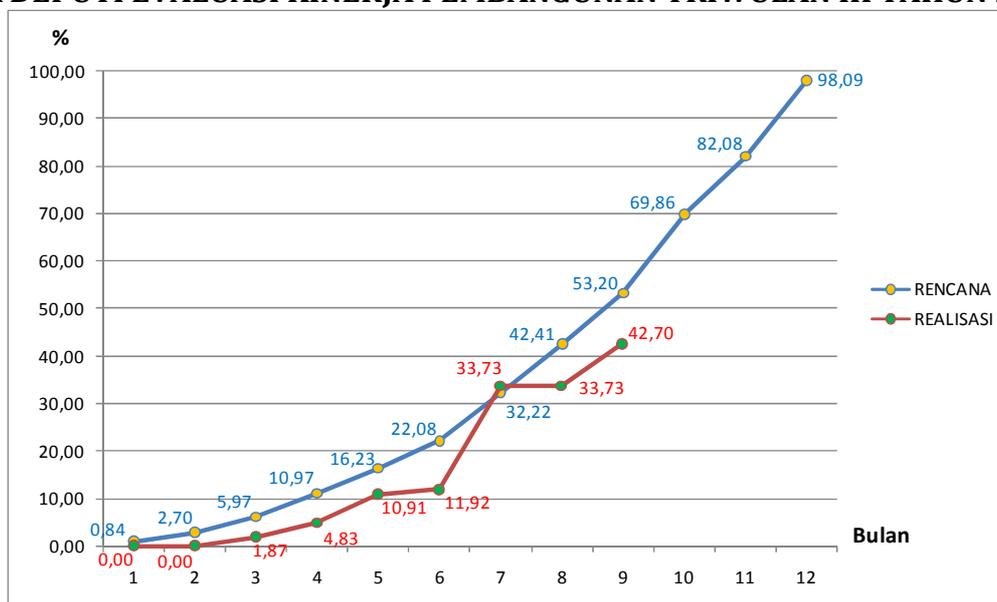
TABEL 16
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN III
TAHUN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
9	PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	15.690.000	-	15.690.000	6.698.925	42,70			6.698.925	42,70
a	Sekretariat PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan	350.000	-	350.000	199.361	56,96	-		199.361	56,96
b	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10.300.000	-	10.300.000	4.100.945	39,82	-		4.100.945	39,82
c	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral	2.670.000	-	2.670.000	1.306.777	48,94	-		1.306.777	48,94
d	Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.370.000	-	2.370.000	1.091.842	46,07	-		1.091.842	46,07

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 12
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2015



10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 16.624.000.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 6.724.000.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 9.900.000.000,-. Realisasi penyerapan sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 5.893.606.423,- (35,45%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 37,18% atau sebesar Rp. 3.680.468.359,-. Dana program ini dialokasikan untuk kegiatan pengairan dan irigasi di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

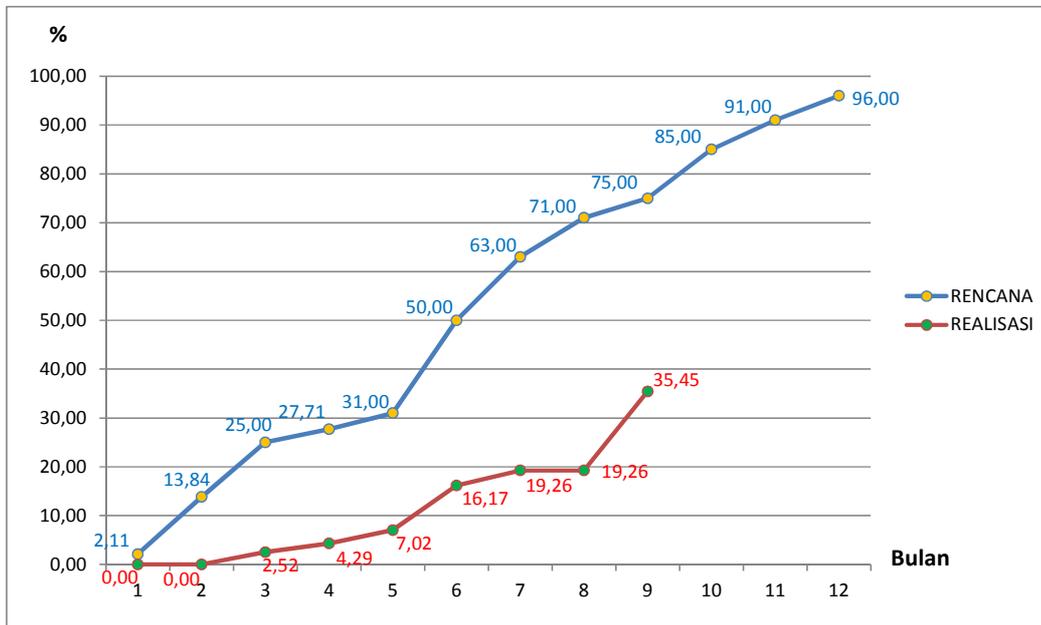
Rendahnya penyerapan PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu antara lain disebabkan :

1. Pengajuan konsultan dengan mekanisme penarikan langsung proses keluar SP3 membutuhkan waktu yang lama, sampai dengan September 2015 jumlah SPP/WA yang belum terbit SP3 sejumlah Rp. 830,795,000.
2. Konsultan IME-DISMP sudah melaksanakan kegiatan tapi belum mengajukan pembayaran bulan April s.d September 2015 sebesar Rp. 895.000.000.
3. Honor kegiatan Rawa dan Koordinasi Strategis belum dipertanggung jawabkan karena adanya restrukturisasi organisasi di beberapa Kementerian lain, sebesar Rp. 534.150.000,-.
4. Belanja Bahan yang di rencanakan pada masing-masing kegiatan saat ini sebagian besar disediakan oleh Biro Umum.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran adalah :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Verifikasi Anggaran Biro Umum dan KPPN untuk mempercepat proses terbitnya SP3.
2. Mendorong pihak konsultan untuk mengajukan proses pembayaran.
3. Koordinasi dengan Instansi terkait untuk mengetahui nama dan jabatan penerima honor.
4. Melakukan revisi internal kegiatan untuk penyesuaian kegiatan dan anggaran.

GAMBAR 13
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU TRIWULAN III
TAHUN 2015



11) PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program*

Alokasi anggaran pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 76.101.250.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 23.214.980.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 52.886.270.000

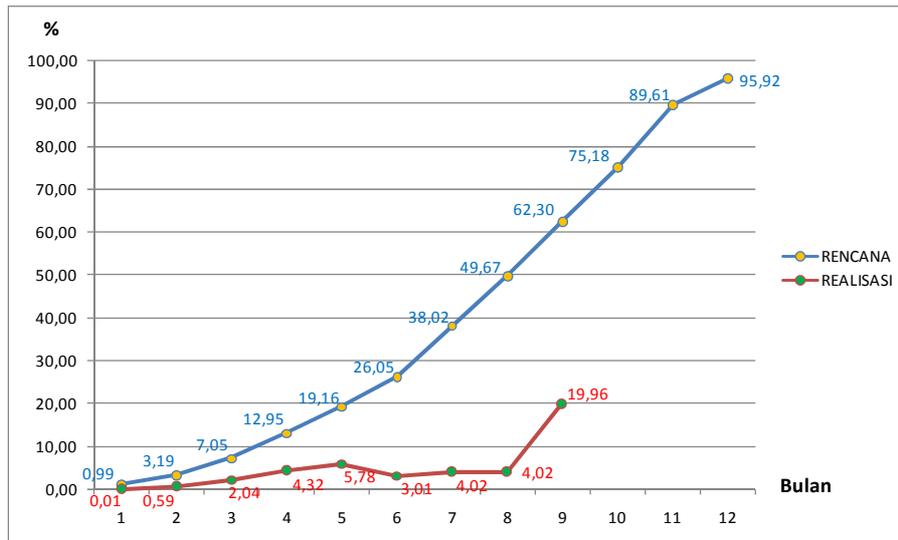
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 15.186.991.159,- (19,96%). Realisasi penyerapan tersebut masih rendah dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri yang hingga saat ini belum terbit SP3 dari KPPN Kementerian Keuangan. Untuk menindak lanjutinya diperlukan koordinasi dengan pihak KPPN Kementerian Keuangan.

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan

- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

GAMBAR 14
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK SEKRETARIAT *INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM*
TRIWULAN III TAHUN 2015



12) PPK Program Pengelolaan Hibah MCC

Pemerintah Amerika Serikat melalui *Millennium Challenge Corporation* (MCC) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang diwakili Menteri Keuangan telah menandatangani kesepakatan hibah *Millennium Challenge Compact* senilai \$600.000.000 untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tanggal 19 November 2011. Dana hibah akan digunakan untuk membiayai tiga proyek yaitu: Kemakmuran Hijau (“Green Prosperity”); Kesehatan dan Gizi berbasis masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek, dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (“*Procurement Modernization*”).

Sesuai dengan PMK Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC bahwa pelaksanaan anggaran yang berasal dari hibah MCC dialokasikan dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC. Selain alokasi dari hibah MCC, dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC juga dialokasikan dana yang bersumber dari Rupiah Murni untuk operasional Satker dan penggantian pajak terkait hibah Program Compact. Pelaksanaan anggaran HLN yang dialokasikan dalam DIPA tersebut menggunakan mekanisme Surat Pengesahan Hibah Langsung

(SPHL), sedangkan untuk alokasi Rupiah Murni menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Alokasi anggaran PPK Pengelolaan Hibah MCC pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 223.000.000.000,-, terdiri dari dana RM sebesar Rp. 13.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 210.000.000.000,-. Realisasi penyerapan sampai dengan triwulan III mencapai Rp 213.966.495.511,- (95,95%).

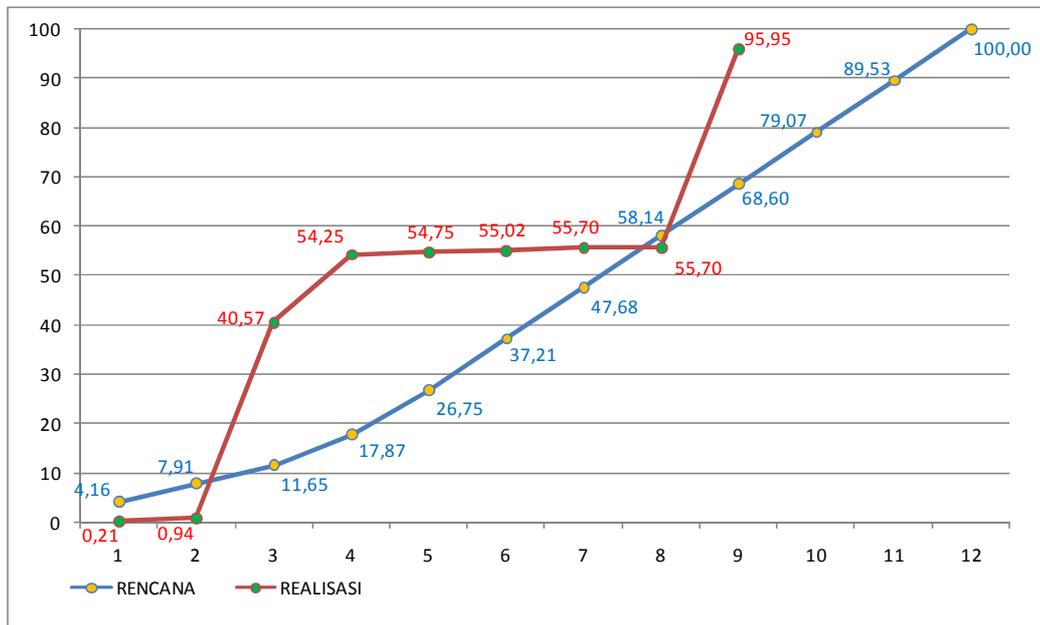
Ada beberapa kendala yang dihadapi hingga triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian penganggaran hibah MCC dengan DIPA dalam penggunaan akun belanja
2. Belum adanya realisasi untuk akun belanja 526xxx (Belanja barang untuk diserahkan kepada Pemda/masyarakat)
3. Sampai dengan kuartal III TA 2015, realisasi penyerapan alokasi Hibah Luar Negeri yang bersumber dari hibah MCC sudah mencapai 95,95%

Dari kendala yang dihadapi tersebut, Satker Pengelola Hibah MCC telah melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan proses persandingan Akun MCA-Indonesia (Standar USA) dengan Akun Pemerintah Indonesia (berdasarkan PB No. 80 Tahun 2011). Satker Pengelola Hibah MCC sudah mengajukan perubahan atau revisi DIPA 2015 dengan menyesuaikan AKUN belanja, dengan demikian, semua pengeluaran yang dibiayai oleh Hibah MCC akan disahkan dalam bentuk SPHL dengan rincian mata akun anggaran yang telah disesuaikan.
2. Penghapusan akun 526xxx didalam RKA-KL TA 2015.
3. Perlu adanya usulan revisi penambahan pagu anggaran untuk alokasi Hibah Luar Negeri pada triwulan IV TA 2015.

GAMBAR 15
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH MCC TRIWULAN III TAHUN 2015



13) Satker Dana Dekonsentrasi Tahun 2015

Dari 33 provinsi pelaksana Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015, sampai dengan Triwulan III, baru 28 satker provinsi yang melakukan penarikan dana, dengan total dana Rp. 13.068.812.189,- (39,60%).

Beberapa kendala dalam pelaksanaan yang dapat diinventarisasi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan antara lain:

1. Dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi, belum terakomodirnya belanja terkait Jasa Konsultan Pihak ke 3, belanja barang, dan belanja modal.
2. Keterlambatan dalam penerbitan juklak/juknis dekonsentrasi.
3. Ketidaksiapan sistem akuntansi berbasis *accrual* oleh Kemenkeu.
4. Terdapat beberapa kali penundaan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan dana dekonsentrasi dikarenakan padatnya kegiatan anggota Satker terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi sebagai SKPD.
5. Adanya aturan yang pembatasan kegiatan rapat di luar kantor yang menyebabkan penyerapan dana lebih rendah dari sebelumnya.

Terkait kendala yang dihadapi, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Juklak/juknis dekonsentrasi agar diterbitkan lebih awal, sebelum dimulainya tahun anggaran.
2. Mendorong Kementerian Keuangan untuk mematangkan sistem akuntansi berbasis *accural* dan memperkecil terjadinya *System Error*.
3. Mengintensifkan koordinasi antar anggota Satker Bappeda Provinsi, terkait dengan penyelesaian kegiatan, penyerapan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Lebih mempermudah jalur komunikasi untuk berkonsultasi bagi daerah dengan Sekretariat Dekonsentrasi di Bappenas.
5. Memperkuat koordinasi diantara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L lain yang mengeluarkan regulasi yang berhimpitan.

TABEL 17
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SATKER DEKOSENTRASI 2015
TRIWULAN III TAHUN 2015

SATKER	PAGU	REALISASI	%
Provinsi DKI Jakarta	799.291.000	-	-
Prvinsi Jawa Barat	838.291.000	138.773.550	16,55
Provinsi Jawa Tengah	915.691.000	504.891.307	55,14
Provinsi DIY	920.491.000	376.192.820	40,87
Provinsi Jawa Timur	943.291.000	115.147.900	12,21
Provinsi Aceh	1.045.291.000	284.476.184	27,22
Provinsi Sumatera Utara	1.006.891.000	527.041.300	52,34
Provinsi Sumatera Barat	958.891.000	525.719.318	54,83
Provinsi Riau	962.491.000	-	-
Provinsi Jambi	931.291.000	332.574.918	35,71
Provinsi Sumatera Selatan	920.491.000	518.431.473	56,32
Provinsi Lampung	882.091.000	503.157.500	57,04
Provinsi Kalimantan Barat	949.291.000	224.022.900	23,60
Provinsi Kalimantan Tengah	960.691.000	359.156.389	37,39
Provinsi Kalimantan Selatan	961.291.000	587.894.700	61,16
Provinsi Kalimantan Timur	1.006.291.000	295.426.175	29,36
Provinsi Sulawesi Utara	1.079.491.000	519.427.370	48,12
Provinsi Sulawesi Tengah	1.080.091.000	778.560.300	72,08
Provinsi Sulawesi Selatan	1.008.091.000	-	-
Provinsi Sulawesi Tenggara	1.027.891.000	361.711.900	35,19
Provinsi Maluku	1.190.491.000	744.294.748	62,52
Provinsi Bali	976.291.000	479.751.925	49,14
Provinsi NTB	974.491.000	324.557.068	33,31
Provinsi NTT	1.078.291.000	521.620.880	48,37
Provinsi Papua	1.252.891.000	267.411.000	21,34
Provinsi Bengkulu	940.291.000	363.564.350	38,67
Provinsi Maluku Utara	1.167.091.000	567.236.500	48,60
Provinsi Banten	823.291.000	-	-
Provinsi Bangka Belitung	913.291.000	298.454.701	32,68
Provinsi Gorontalo	1.063.891.000	727.069.450	68,34
Provinsi Kepulauan Riau	955.291.000	653.121.600	68,37
Provinsi Papua Barat	1.400.491.000	429.461.600	30,67
Provinsi Sulawesi Barat	1.066.291.000	739.662.363	69,37
JUMLAH	33.000.003.000	13.068.812.189	39,60

Sumber : Ditjen Anggaran, Kem. Keuangan, <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/2015>

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2015 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 676.029.873.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 370.112.914.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 305.916.959.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan September 2015 mencapai Rp. 377.860.908.390,- (55,89%) yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 187.458.454.665,- (50,65%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 190.402.453.725,- (62,24%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 5 (lima) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 18.

TABEL 18
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	370.112.914	305.916.959	676.029.873	187.458.449	50,65	190.402.454	62,24	377.860.903	55,89
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS I	53.747.558	-	53.747.558	11.908.512	22,16	-		11.908.512	22,16
	a Sekretariat PPK Program DM I	49.850.161	-	49.850.161	11.038.599	22,14			11.038.599	22,14
	b Biro Renortala	3.897.397	-	3.897.397	869.913	22,32			869.913	22,32
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II	34.543.362	-	34.543.362	13.431.044	38,88	-		13.431.044	38,88
	a Sekretariat PPK Program DM II	379.810	-	379.810	370.190	97,47			370.190	97,47
	b Staf Ahli	9.250.000	-	9.250.000	2.001.067	21,63			2.001.067	21,63
	c Pusdatinrenbang	9.360.300	-	9.360.300	3.376.199	36,07			3.376.199	36,07
	d Biro Humas dan TU Pimpinan	7.760.190	-	7.760.190	3.889.911	50,13			3.889.911	50,13
	e Biro SDM	6.293.062	-	6.293.062	3.055.975	48,56			3.055.975	48,56
	f Biro Hukum	1.500.000	-	1.500.000	737.702	49,18			737.702	49,18
3	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS III	225.625.001	-	225.625.001	131.444.479	58,26	-		131.444.479	58,26
	a Biro Umum/Sekretariat	225.625.001	-	225.625.001	131.444.479	58,26			131.444.479	58,26
4	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV	54.756.993	305.916.959	360.673.952	29.954.414	54,70	190.402.454	62,24	220.356.868	61,10
	a Pusbindiklatren	54.756.993	305.916.959	360.673.952	29.954.414	54,70	190.402.454	62,24	220.356.868	61,10
5	PPK DANA OPERASIONAL MENTERI	1.440.000		1.440.000	720.000	50,00			720.000	50,00

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

1) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas I sebesar Rp. 53.747.558.000,-, sampai dengan Triwulan III 2015 dana yang sudah diserap sebesar Rp. 11.908.512.805,- (22,16%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 16.

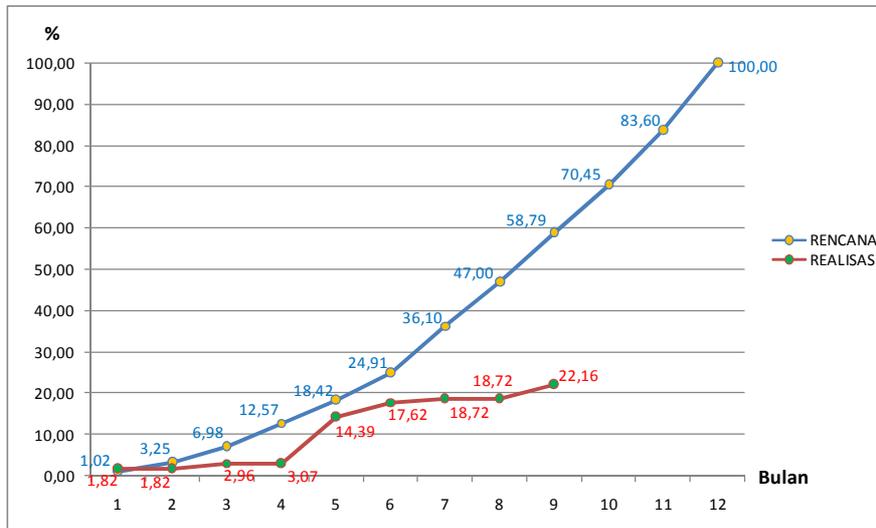
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III masih rendah disebabkan :

1. Anggaran pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan untuk 3 (tiga) kali pelaksanaan, namun sampai dengan saat ini Rapat Kerja terkendala oleh kondisi internal Kementerian PPN/Bappenas.
2. Sosialisasi RPJMN 2015 – 2019 ke beberapa provinsi yang direncanakan akan melibatkan pimpinan/anggota Komisi XI DPR RI terlaksana, namun tanpa keikutsertaan Pimpinan/Anggota Komisi XI DPR RI.

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka :

1. Pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian PPN/Bappenas akan dilaksanakan pada akhir tahun.
2. Sosialisasi RPJMN 2015 – 2019 akan lebih banyak melibatkan Pejabat/Pegawai Kementerian PPN/Bappenas.
3. Upaya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas seluruh provinsi melalui pelaksanaan Rapat Teknis.
4. Penguatan penyusunan RKP melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di 2 (dua) wilayah.

GAMBAR 16
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DUKUNGAN MANAJEMEN I TRIWULAN III TAHUN 2015



2) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas II sebesar Rp. 34.543.362.000,- dan telah ditarik Rp. 13.431.047.735,- (38,88%). PPK DM II mengkoordinasikan kegiatan pada Staf Ahli, Pusat Data Informasi Perencanaan Pembangunan, Biro Humas dan TU Pimpinan, Biro SDM, dan Biro Hukum. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 19 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 15.

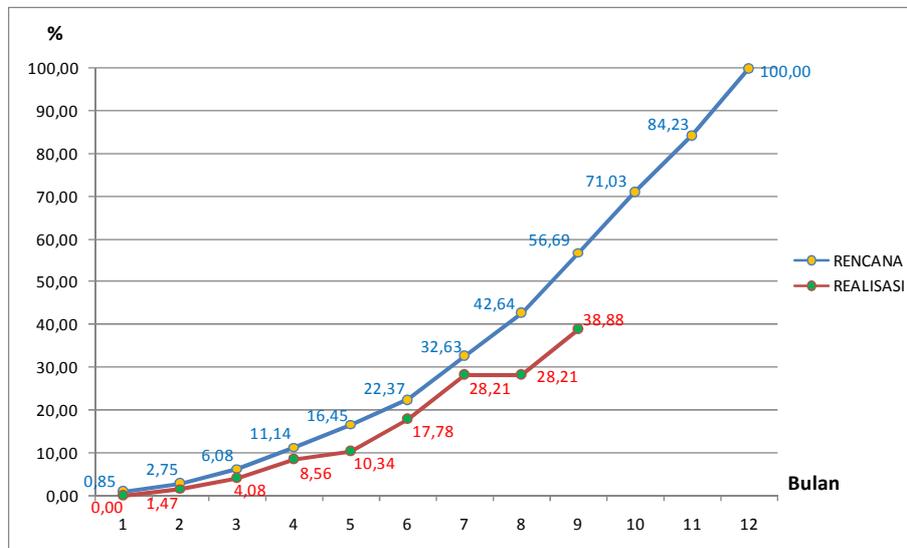
Masih rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang akan dilakukan penarikan pada akhir tahun, antara lain :

1. Sewa Layanan Digital Jurnal (Pusdatin),
2. Belanja Media (Biro Humas dan Konsultan Kehumasan Biro Humas), dan
3. Kegiatan Staf Ahli SDM-PK yang tidak jadi dilaksanakan sehingga tidak ada penyerapan anggaran.

Upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut diantaranya :

1. Mempercepat proses kontrak sewa layanan jurnal digital
2. Mempercepat proses administrasi dokumen kontrak Konsultan kehumasan
3. Merealokasi anggaran Kegiatan Staf Ahli SDM-PK

GAMBAR 17
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DUKUNGAN MANAJEMEN II TRIWULAN III TAHUN 2015



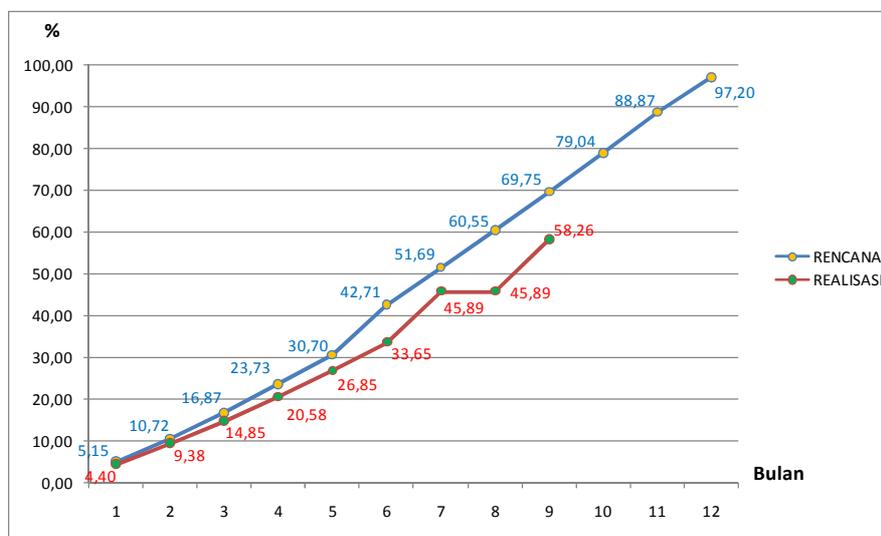
3) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III sebesar Rp. 225.625.001.000, dan telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 131.444.479.265,- (58,26%). Anggaran PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas III sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil.

Kendala yang dihadapi sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 adalah lambatnya proses administrasi dan sinkronisasi Tunjangan Kinerja antara Bagian Keuangan Biro Umum, Biro SDM, dan KPPN Kementerian Keuangan.

Untuk menyelesaikan kendala tersebut, Biro Umum, Biro SDM, dan KPPN Kementerian Keuangan diharapkan lebih meningkatkan koordinasi terkait tunjangan kinerja.

GAMBAR 18
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DUKUNGAN MANAJEMEN III TRIWULAN III TAHUN 2015



4) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV

Alokasi anggaran pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV sebesar Rp. 360.673.952.000,- yang terdiri dari Rp 54.756.993.000,- dana RM, dan dan PLN sebesar Rp. 305.916.959.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 220.356.868.585,- (61,10%). Berikut status pelaksanaan PLN yang dikelola oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana:

- a. *Professional Human Resources Development Project (PHRDP) III – JICA (IP-535)*. Alokasi tahun 2015 sebesar Rp JPY 116,667 juta (Rp 14 M). Sedang diproses untuk pembayaran konsultan dan DLS.
- b. *Professional Human Resources Development (PHRD) IV – JICA (IP-568)*. Alokasi DIPA 2015 adalah JPY 901.321,1 juta. Pada Triwulan II belum ada penyerapan. Pembayaran terbesar akan dilakukan pada bulan September (masuk kuliah).
- c. *Scholarship Program for Strengthening Reforming Institutions (SPIRIT) – Bank Dunia (8010-ID)*. Alokasi DIPA 2015 adalah sebesar USD 24.306.000 dan telah diserap USD 1.159.364 untuk pembayaran *tuition fee* dan *allowance*.

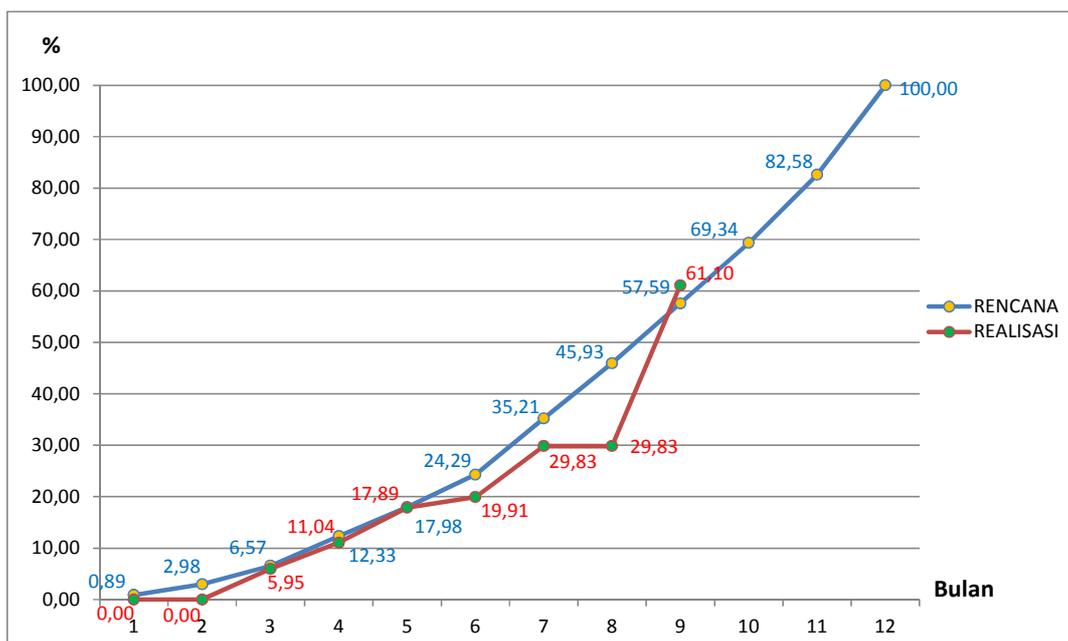
Ada beberapa permasalahan yang terdapat pada PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas IV, antara lain :

1. Adanya beberapa peserta beasiswa luar negeri yang masih belum memiliki paspor dinas sehingga tidak bisa melanjutkan program beasiswanya;
2. Terhambatnya pangadaan konsultan baru untuk pengelolaan Beasiswa PHRD IV;
3. Terhambatnya pengisian Rekening Khusus PHRD III dikarenakan adanya selisih bukti pengeluaran (SOE) PHRD III;
4. Kurangnya ketersediaan dana rekening khusus akibat terlambatnya revisi eksternal DIPA.

Kepala pusbindiklatren telah mengambil langkah :

1. a. Penerima beasiswa luar negeri dianjurkan membuat surat pernyataan,
 b. Kapusbindiklatren meminta dispensasi Sesmen PPN/Sestama Bappenas agar siswa dapat menggunakan paspor hijau dengan catatan telah mendapatkan surat tugas dari Setneg;
2. Menggunakan jasa konsultan sementara dengan cara memperpanjang kontrak konsultan sebelumnya;
3. Mengadakan rapat konsolidasi laporan bukti pengeluaran dengan Kementerian Keuangan dan pihak JICA;
4. Mendorong percepatan terbitnya revisi eksternal DIPA.

GAMBAR 19
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DUKUNGAN MANAJEMEN IV TRIWULAN III TAHUN 2015



5) PPK Dana Operasional Menteri

Alokasi anggaran pada PPK Dana Operasional Menteri (DOM) sebesar Rp 1.440.000.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- (50,00%). Penggunaan anggaran pada PPK DOM disesuaikan dengan kebutuhan dan operasional Menteri sampai akhir tahun 2015.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2015 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 40.000.000.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.281.330.209,- (23,20%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

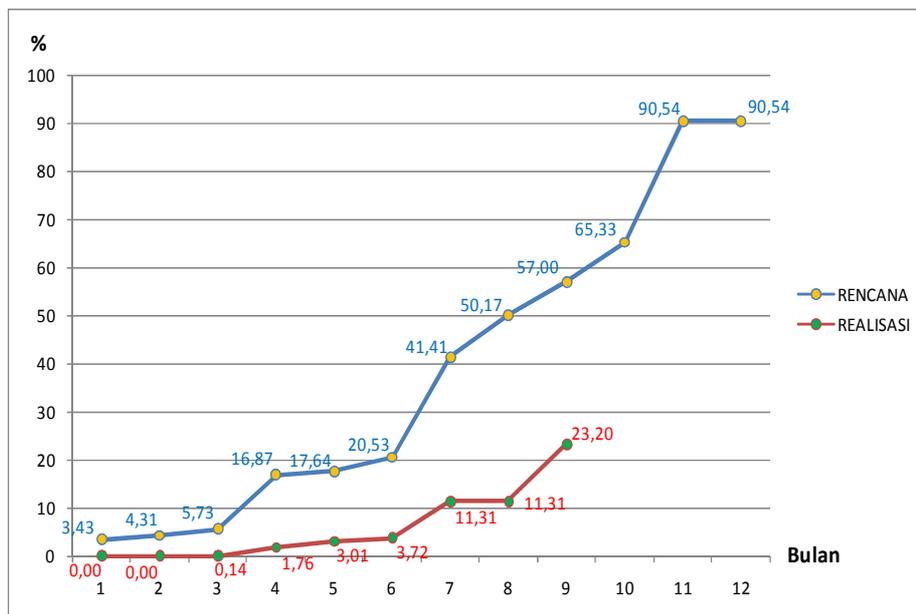
Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III masih rendah, dikarenakan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Eselon I dibatalkan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
2. Konsultan lama mengundurkan diri pada saat pekerjaan sedang berjalan sehingga ada pergantian SDM/konsultan perencana individu yang baru.
3. Dokumen perencanaan lelang gedung arsip tidak ada softcopy, dan kekeliruan desain perencanaan dan dokumen lainnya, sehingga pelaksanaan juga mendekati ke akhir tahun.
4. Adanya anggaran yang belum tercantum pada RKA K/L dan pengadaan-pengadaan lainnya yang diusulkan menumpuk di akhir tahun.

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran adalah:

1. Pengadaan kendaraan dinas ditunda dan alokasi anggaran kegiatan dialihkan ke pengadaan lainnya.
2. Segera melakukan pencarian konsultan pengganti.
3. Penyusunan ulang dokumen perencanaan gedung dan pengalihan beberapa pekerjaan.
4. Melakukan revisi anggaran untuk penyesuaian kegiatan.

GAMBAR 20
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS
TRIWULAN III TAHUN 2015



D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 5.275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.244.396.887,- (42,55%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Ada beberapa kendala yang menyebabkan masih rendahnya penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III, antara lain :

1. Pembatasan jumlah pegawai yang dapat ditarik honor output kegiatan
2. Pembatasan pelaksanaan rapat di luar kantor (konsinyiring hotel)
3. Beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut perlu dilaksanakannya revisi anggaran, percepatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, rapat koordinasi antara PPK dengan unit kerja, dan segera melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan yang tertunda.

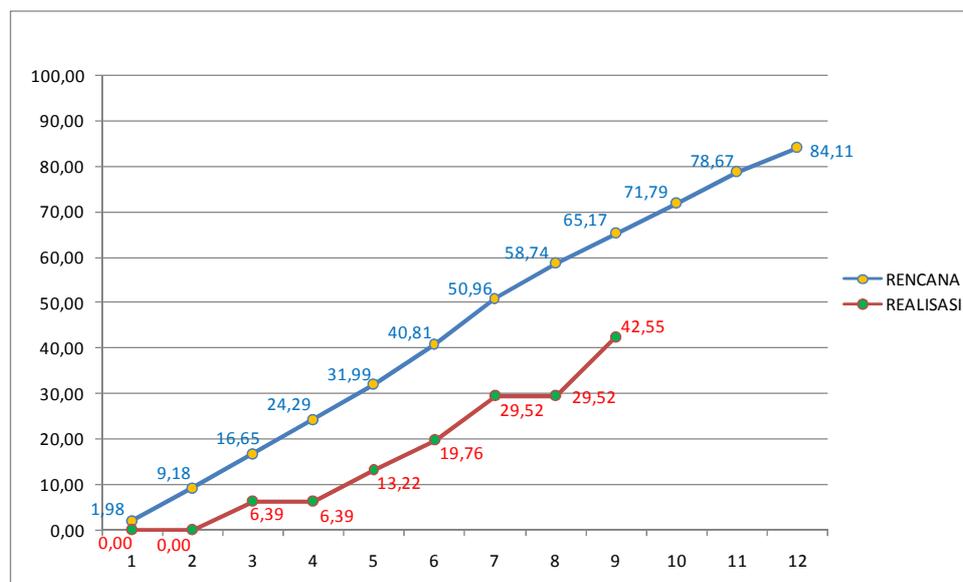
Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 15.

TABEL 19
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN III TAHUN 2015

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR		5.275.000	-	5.275.000	2.244.396	42,55	-	-	2.244.396	42,55
a	Inspektorat Utama/Sekretariat PPK	275.000		275.000	121.660	44,24			121.660	44,24
b	Inspektorat Bidang Administrasi Umum	3.000.000		3.000.000	1.250.587	41,69			1.250.587	41,69
c	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan	2.000.000		2.000.000	872.149	43,61			872.149	43,61

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum

GAMBAR 21
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN III TAHUN 2015



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Maret 2015 (Triwulan II), dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.281.869.794.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 660.164.354.000,-, dan PHLN sebesar Rp. 621.705.440.000,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp. 711.706.734.757,- (55,52%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 299.308.289.184,- (45,34%), dan dana PHLN sebesar Rp. 412.398.445.573,- (66,33%).
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Triwulan III masih rendah. Rendahnya penyerapan tersebut disebabkan antara lain:
 - 1) Adanya pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar kantor yang menyebabkan realisasi kegiatan unit perlu direvisi secara substansial berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur.
 - b. Memorandum Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 472/Ses/04/2015 Tanggal 15 April 2015 Tentang Tata kelola Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Peraturan tersebut bertujuan agar unit tetap dapat berkinerja tanpa tergantung dengan aturan Menpan tersebut.
 - 2) Waktu pengesahan atas pencairan anggaran yang dibiayai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), membutuhkan waktu yang relative lama.
 - 3) Perubahan Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Eselon I sesuai dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya Rapat Koordinasi percepatan penyerapan anggaran yang dipimpin oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas secara intensif.
2. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
 - a. Melakukan penyesuaian kegiatan atau merealokasi anggaran belanja rapat di luar kantor ke belanja lainnya sesuai kebutuhan.
 - b. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN Kementerian Keuangan terkait penerbitan SP3.
 - c. Melaksanakan segera atau mempercepat kegiatan sesuai dengan SK yang sudah direvisi.
2. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
3. Perlunya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur dalam penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran akan tepat sasaran dan indikator kinerja yang direncanakan akan tercapai.